

# EVALUASI PENGENDALIAN MANAJEMEN SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA (Studi Pada PD. BPR BANK JOMBANG)

**Chalid Hermaditya Kaspandi**  
**Sri Mangesti Rahayu**  
**Dwi Atmanto**

Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang

Email: [chalid.herdy@gmail.com](mailto:chalid.herdy@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*PD BPR Bank Jombang in Jombang District has quite reliable managerial control over credit because it has competent and trusted personnel. Managerial control over credit has been well implemented because it is operated by good and responsible bank officer. Good managerial control of credit is confirmed by controlling over assets and related books. It is verified on the spot to ensure the compatibility of debtor document and interview result with the actual occurrence. However, some constraints exist against managerial control of credit such as the overlapping of task, the lack of forms and documents with form number, lack of precision in analyzing customer candidates in term of character, capital, capacity, condition of economy, and collateral factors, and lack of sudden examination or surprise audit.*

**Keywords:** *control management, work capital credit*

## **ABSTRAK**

*PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang telah mencerminkan pengendalian manajemen kredit yang cukup memadai dilihat dari personel yang kompeten dan dapat dipercaya. Pengendalian manajemen kredit telah berjalan dengan baik, karena telah dilaksanakan oleh petugas bank dengan baik dan penuh tanggungjawab. Pengendalian manajemen kredit telah berjalan dengan baik jika dilihat dari kontrol aktiva dengan catatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya on the spot dengan tujuan untuk mencocokkan antara berkas debitur dan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya di lapangan apakah sesuai atau tidak. Namun masih terdapat juga beberapa kekurangan dalam pengendalian manajemen kreditnya, yaitu : masih adanya perangkapan tugas, tidak adanya sebagian formulir atau dokumen yang mencantumkan nomer formulir, belum adanya ketelitian dalam menganalisis penerimaan calon nasabah yang mencakup faktor character, capital, capacity, condition of economy, collateral serta tidak adanya pemeriksaan mendadak atau (surprise audit).*

**Kata kunci :** *pengendalian manajemen, kredit modal kerja*

## **PENDAHULUAN**

PD BPR Bank Jombang adalah lembaga keuangan mikro konvensional yang masih ada hingga sekarang dan beroperasi melayani masyarakat luas khususnya masyarakat menengah kecil. Kegiatan utama PD BPR Bank Jombang adalah memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk memberikan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk memberikan pelunasan atas hutangnya setelah jatuh tempo jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

PD. BPR Bank Jombang adalah lembaga keuangan mikro yang berperan untuk memberikan jasa penyediaan keuangan khususnya kredit. Besar kecilnya kecilnya kredit yang bisa disalurkan sangatlah mempengaruhi keuntungan yang akan didapat oleh PD. BPR Bank Jombang. Apabila penyaluran kredit padat maka keuntungan yang diperoleh juga akan tinggi, namun sebaliknya

apabila arus kredit lemah dan banyak dana yang tersimpan maka PD. BPR bank Jombang bisa menderita kerugian.. Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit hingga penagihan kredit.

Penerapan sistem akuntansi yang handal dan memadai sangat penting bagi perusahaan. Sistem akuntansi tersebut biasanya diterapkan terhadap aset ataupun modal terbesar perusahaan. Wajar jika suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan memberlakukan suatu sistem akuntansi terhadap pemberian kredit karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasi utama perusahaan. Pada PD BPR Bank Jombang terdapat kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*). Hal itu biasanya terjadi karena disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal Bank itu. Faktor internal timbul dari dalam Bank itu sendiri, misalnya kecerobohan analisis kredit, kesalahan penafsiran agunan, dan kurangnya tanggung jawab fungsional karyawan Bank. Sedangkan faktor eksternal timbul karena pihak luar Bank atau pihak debitur atau pemohon kredit. Sebagai contoh apabila terdapat usaha yang tidak berjalan lancar yang menimbulkan pembayaran kredit lambat, permintaan pasar menurun dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut akhirnya menyebabkan kredit yang diberikan PD BPR Bank Jombang pada debitur mengalami masalah mulai keterlambatan dalam proses pembayaran angsuran kredit hingga kredit tidak dapat dilunasi atau mengalami kredit macet.

PD. BPR Bank Jombang menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan pada nasabahnya terutama dalam pemberian kredit. Salah satunya adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan pada nasabah untuk memenuhi modal kerjanya. Proses pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Jombang memerlukan pengelolaan khusus. Oleh karena itu dapat membentuk suatu sistem pengendalian manajemen yang digunakan untuk proses pemberian kredit, mulai dari pemberian kredit hingga pelunasan kredit.

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimanakah sistem pemberian kredit modal usaha pada PD. BPR Bank Jombang ? dan apakah sistem pemberian kredit yang diterapkan PD BPR Bank Jombang

sudah sesuai dengan aspek-aspek pengendalian manajemen?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bank Jombang dan untuk mengetahui sistem pemberian kredit yang diterapkan PD BPR Bank Jombang sudah sesuai dengan aspek-aspek pengendalian manajemen yang baik atau belum.

## KAJIAN PUSTAKA

### Sistem Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2006:165) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan cara serta ukuran-ukuran yang dikoordinasikan oleh manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Hal tersebut juga didukung oleh pengertian dari AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) yang dikutip oleh Bambang Hartadi (2005:121) bahwa sistem pengendalian intern juga meliputi struktur organisasi, ketentuan-ketentuan yang dikoordinasikan dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan perusahaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha serta mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.

Menurut Mulyadi (2006:166) untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka terdapat empat unsur pokok yang harus dipenuhi oleh perusahaan antara lain:

- a. Struktur organisasi dapat memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas sehingga tugas dari tiap divisi sangat jelas.
- b. Wewenang dan prosedur dalam pencatatan yang memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggungjawabnya.
- e. Sistem pengendalian intern yang memadai bagi perusahaan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, tergantung dari sifat serta keadaan masing-masing perusahaan. Dalam artian tidak ada sistem pengendalian intern

yang bersifat universal yang dapat dipakai oleh seluruh perusahaan.

Sistem pengendalian intern menurut pendapat Mulyadi (2006:81) terdapat beberapa elemen antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat karyawan yang jujur dan cakap.
- b. Terdapat pemisahan tugas dan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
- c. Terdapat prosedur otoritas yang tepat.
- d. Tersedianya dokumen serta catatan yang memadai.
- e. Pengawasan secara fisik terhadap setiap harta serta catatan perusahaan.
- f. Pada waktu tertentu dilaksanakannya penyelidikan secara independen, misalnya dari pihak auditor luar.

### **Kredit Perbankan**

Pengertian kredit perbankan menurut Sinungan (2001:3) adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak-pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan atau disepakati. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian kredit juga didasarkan pada kepercayaan yang berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan jangka waktu tertentu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat Suyatno dalam Malayu (2004:88) yang menyatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Menurut Suhardjono (2003:11) mendefinisikan bahwa kredit adalah menyediakan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan yang berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau prestasi yang diperoleh peminjam kredit. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah jasa pendanaan yang disediakan oleh kreditur/ Bank kepada debitur/ peminjam dengan disertai perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur dimana pihak debitur berkewajiban untuk

melunasi pinjaman tersebut pada masa yang telah ditentukan dan pihak kreditur mempunyai hak untuk memungut bunga pinjaman sebagai keuntungannya. Sistem pengendalian manajemen tersebut terdapat beberapa aspek-aspek dalam proses pengendalian kredit. Aspek- aspek tersebut antara lain:

- a. Aspek pengendalian personel atau sumberdaya yang kompeten dan dapat dipercaya
- b. Aspek pengendalian yang terdapat pemisahan tugas atau wewenang.
- c. Aspek pengendalian prosedur atau otorisasi yang tepat
- d. Aspek pengendalian dokumen atau catatan yang memadai dan jelas.
- e. Aspek pengendalian kontrol fisik tentang aktiva dan catatan.
- f. Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen.

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2005: 54), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan informasi mengenai suatu keadaan yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara langsung, studi lapangan, dokumen-dokumen perusahaan, untuk dipahami kemudian dibuat laporan dan dapat dijadikan informasi tambahan untuk orang lain. (Sugiyono, 2008:244).

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di awal, maka langkah-langkah evaluasi data dalam perkreditan ini sebagai berikut:

1. Mengevaluasi sistem pemberian Kredit Modal Kerja pada PD BPR Bank Jombang meliputi prosedur permohonan, analisis, pencairan, sampai pada pengawasan sistem pemberian Kredit Modal Kerja pada PD BPR Bank Jombang.
2. Mengevaluasi pengendalian manajemen dalam sistem pemberian Kredit Modal Kerja pada PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang, sehingga diketahui apakah pengendalian manajemen yang berlaku sudah sesuai dengan pengendalian manajemen kredit yang baik. Analisis meliputi unsur-unsur pengendalian intern dan aspek -aspek pengendalian manajemen kredit sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi telah menggambarkan pemisahan tanggung jawab secara tegas.
  - b) Personil yang kompeten dan dapat dipercaya, mulai dari saat permohonan, analisis, pencairan sampai pada pengawasan kredit.
  - c) Adanya pemisahan tugas, fungsi, dan sistem wewenang mulai dari saat permohonan, analisis, pencairan sampai pada pengawasan kredit.
  - d) Prosedur otorisasi yang tepat, mulai dari saat permohonan, analisis, pencairan sampai pada pengawasan kredit.
  - e) Dokumen dan catatan yang memadai, mulai dari saat permohonan, analisis, pencairan sampai pada pengawasan kredit.
  - f) Kontrol fisik aktiva dan catatan, mulai dari saat permohonan, analisis, pencairan sampai pada pengawasan kredit.
3. Mencari alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, baik di dalam sistem dan prosedur maupun pengendalian manajemen yang dilaksanakan dalam pemberian Kredit Modal Kerja PD BPR Bank Jombang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek-aspek pengendalian manajemen dalam Prosedur pemberian kredit modal kerja

1. Aspek pengendalian personel yang kompeten dan dapat dipercaya
  - a. Saat proses permohonan kredit  
Nasabah PD BPR Bank Jombang yang ingin mengajukan kredit terlebih dahulu mendatangi Bank dan melengkapi Surat Permohonan Kredit (SPK) yang akan diberikan oleh Administrasi Kredit (ADK) dan apabila sudah dilengkapi surat tersebut diserahkan kembali kepada bagian Administrasi Kredit. Pada langkah ini Administrasi Kredit sudah dinilai kompeten karena mempunyai kemampuan untuk mengelola dan menindaklanjuti permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah PD. BPR Bank Jombang.
  - b. Saat proses analisis kredit  
*Account Officer* adalah petugas yang akan melakukan wawancara langsung dan survey kepada nasabah yang mengajukan kredit. Hasil wawancara dan survei tersebut kemudian dianalisis oleh *Account Officer*. Dari hasil analisis tersebut *Account Officer* bisa menilai apakah pengajuan kredit

tersenut sudah layak atau belum. Apabila layak *Account Officer* akan menyerahkan data ke bagian komite kredit. Pada PD. BPR Bank Jombang proses analisis pengajuan kredit dirasa sudah berjalan baik dan objektif.

- c. Saat proses penarikan kredit  
Komite kredit akan mengkaji ulang mengenai analisis kredit yang diberikan oleh *Account Officer*. Dari tinjauan ulang tersebut komite kredit memiliki wewenang memberikan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan kredit. Komite kredit juga mengetahui tentang penyediaan Kas pada PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang. Pada tahap ini aspek pengendalian kredit dinilai sudah berjalan dengan jujur dan objektif.
  - d. Saat monitoring  
Pada PD BPR Bank Jombang *account officer* merangkap tugas untuk monitoring. Nasabah yang telah diberikan kredit akan terus dipantau oleh *account officer* sehingga akan tahu apakah nasabah tersebut mempunyai masalah dalam usahanya atau tidak. Apabila terdapat masalah *account officer* harus dengan cepat memikirkan cara agar tidak menimbulkan kredit macet.
2. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas
    - a. Saat proses permohonan kredit  
Pada saat proses permohonan kredit aspek pengendalian pemisahan tugas belum berjalan dengan baik, karena yang bertugas memeriksa jaminan dan yang bertugas menganalisa permohonan kredit adalah petugas yang sama yaitu *account officer*. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya manipulasi data yang dilakukan *account officer* karena perangkapan tugas.
    - b. Saat proses analisis kredit  
Pada saat analisis kredit, analisis yang telah dilakukan oleh bagian *account officer* dilanjutkan ke bagian komite kredit. Kemudian komite kredit akan mengeluarkan rekomendasi apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Dengan demikian pengendalian manajemen kredit pada saat proses analisis sudah mencerminkan adanya pemisahan tugas.
    - c. Saat proses penarikan kredit  
Saat proses penarikan kredit terlihat adanya pemisahan tugas. Komite kredit yang memiliki wewenang untuk menerima atau

- menolak pengajuan kredit yang diberikan. Apabila pengajuan kredit diterima, bagian keuangan akan bertugas melayani nasabah yang melakukan pengajuan kredit. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas pada proses penarikan kredit sudah berjalan dengan baik.
- d. Saat monitoring
 

Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas saat monitoring berjalan dengan baik. Dilihat dari bagian Administrasi Kredit memberikan informasi kepada *account officer*. *Account officer* melakukan peninjauan ulang yang disamakan dengan lapangan yang nantinya dilaporkan pada komite kredit.
3. Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat
    - a. Saat proses permohonan kredit
 

Prosedur otorisasi yang dijalankan oleh PD BPR bank Jombang dirasa sudah baik, karena proses kredit akan dilakukan jika syarat-syarat yang ditentukan oleh bank sudah dipenuhi semua oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada.
    - b. Saat proses analisis kredit
 

Prosedur otorisasi PD BPR bank Jombang sudah baik, karna prosedur otorisasi dilihat dari hasil analisa *account officer* yang diberikan kepada komite kredit yang berwenang sebagai pembuat keputusan kredit yang akan dikaji ulang oleh komite kredit yang berisikan direktur utama, direktur, dan manajer kredit.
    - c. Saat proses penarikan kredit
 

Di PD BPR Bank Jombang dinilai sudah mencerminkan pengendalian prosedur otorisasi yang baik, karena proses pencairan kredit dilakukan dengan baik oleh bagian keuangan sesuai dengan fungsinya.
    - d. Saat monitoring
 

*Account officer* bertugas melakukan monitoring, dengan memperhatikan catatan dari bagian administrasi. *Account officer* akan terus mengawasi usaha nasabah tersebut yang kemudian mencocokkannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
  4. Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai.
    - a. Saat proses permohonan kredit
 

Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai dalam proses permohonan kredit telah berjalan dengan baik. Nasabah yang mengajukan kredit usaha tidak perlu membuat proposal dalam pengajuan kreditnya, cukup dengan mengisi Surat permohonan kredit (SPK) yang didalamnya sudah mencakup Form Persyaratan Kredit (FPK) serta Form Penyerahan Jaminan (FPJ). Namun dalam surat permohonan kredit ini ada sedikit kelemahan. Kelemahannya adalah tidak tercantumnya nomor urut formulir.
    - b. Saat proses analisis kredit
 

Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai dalam proses analisis kredit dirasa sudah memadai. *Account officer* melakukan analisis pada data nasabah yang kemudian dilaporkan ke Komite Kredit. Untuk menganalisis *account officer* menganalisis data tersebut berdasarkan data yang didapatkan saat kunjungan langsung agar data yang didapatkan selengkap mungkin. Hal ini mencerminkan pengendalian manajemen kredit yang memadai.
    - c. Saat proses penarikan kredit
 

Aspek pengendalian dokumen catatan yang memadai dalam proses penarikan kredit dirasakan sudah memadai. Nasabah yang kreditnya disetujui oleh Bank, dibuatkan formulir persetujuan kredit (FSK) yang sudah ditandatangani oleh nasabah, untuk selanjutnya dicairkan ke nasabah.
    - d. Saat monitoring
 

Aspek pengendalian dokumen dan catatan yang memadai pada proses monitoring dirasa belum cukup baik. Berkas kredit yang di arsipkan oleh administrasi kredit disimpan tanpa nomor urut, hal ini kan menyulitkan *account officer* dalam memantau nasabah sesuai dengan berkas yang diarsipkan.
  5. Aspek pengendalian control fisik aktiva dan catatan
    - a. Saat proses permohonan kredit
 

Pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit *account officer* akan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diberikan oleh nasabah sesuai dengan kenyataan. Aspek Pengendalian control aktiva dan catatan pada saat proses permohonan sudah berjalan baik.
    - b. Saat proses analisis kredit
 

*Account officer* dirasa sudah memenuhi tugasnya dalam menganalisa dengan

menggunakan prinsip kredit 5C dan menganalisisnya berdasarkan hasil kunjungan langsung. Jadi pengendalian control aktiva dan cacatan pada saat analisis yang di lakukan oleh *account officer* sudah berjalan dengan baik.

c. Saat proses penarikan kredit

Pada saat penarikan kredit telah dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah, pengendalian control fisik aktiva dan catatan yang terjadi dokumen yang dipakainya telah disimpan ditempat yang aman.

d. Saat monitoring

Bagian *account officer* melakukan monitoring secara berkala diusaha nasabah yang menjadi pokok mengapa nasabah tersebut mengajukan kredit. Pemantauan tersebut meliputi ricek antara laporan dari nasabah dengan keadaan di lapangan. Pengendalian control fisik aktiva dan catatan dilaksanakan dengan baik.

6. Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen

Pada kantor pusat PD BPR bank Jombang sudah mencerminkan Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan secara independen yang baik karena telah memiliki internal audit dan ada baiknya jika adanya pemeriksaan kinerja karyawan ini dilakukan secara mendadak. Agar karyawan PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang selalu bekerja dengan baik.

7. Alternatif prosedur kredit modal kerja yang disarankan :

PD. BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang menyediakan fasilitas kredit terutama ditinjau untuk kredit investasi dan modal kerja umum. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada PD. BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang yang disarankan penulis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Persiapan Kredit

Meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Wawancara terhadap calon debitur oleh petugas yang berwenang, di kantor pusat kepala Biro/kepala Bagian atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pengisian formulir permohonan kredit.
- 3) Pengisian Formulir Surat Kuasa Memotong Gaji
- 4) Pengisian Surat Pernyataan
- 5) Pengisian Surat Persetujuan untuk membuat menandatangani Akte

Pengakuan Utang dengan memakai jaminan.

6) Pencatatan permohonan kredit oleh petugas yang ditunjuk pada buku agenda "Permohonan Kredit.

7) Dokumen-dokumen/keterangan-keterangan yang harus dilampirkan pada surat permohonan kredit

b. Analisa Kredit

1) Peninjauan terhadap perusahaan permohonan dan sekaligus mengadakan wawancara dengan pemilik/petugas perusahaan. Maksudnya adalah untuk mengecek kebenaran dari informasi yang diterima apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan. Dalam hal ini petugas mencocokkan Foto Copy dokumen dengan aslinya serta menyatakan sama dengan aslinya

2) Pada dasarnya untuk setiap pemberian kredit perlu dibuat analisa kreditnya tetapi dalam hal kredit yang relatif kecil bentuknya akan lebih sederhana yang akan diatur dengan petunjuk tersendiri.

3) Dalam hal analisa kredit di luar sektor industri penerapan analisa aspek teknis tidak mutlak sepenuhnya dilaksanakan, tetapi hanya terbatas pada yang ada kaitannya langsung dengan usahanya.

c. Keputusan Kredit

1) Keputusan penolakan, yaitu bilamana permohonan kredit tidak dapat dikabulkan.

Terhadap kredit-kredit yang ditolak dituangkan dalam Surat Penolakan Kredit, kecuali untuk permohonan yang perlu ditolak pada saat setelah langkah "wawancara" tetapi belum mengisi formulir permohonan kredit, dimana dalam hal ini penolakan dapat dilakukan secara lisan.

Pada umumnya permohonan ditolak karena berdasarkan analisa, usahanya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku, (dalam hal ini termasuk pula sektor-sektor yang sudah jenuh atau terlarang, telah masuk daftar hitam giro, daftar kredit macet atau keadaan surat jaminan, misalnya SKPT telah melebihi 3 (tiga) bulan dan guna bangunan yang telah habis masa waktunya).

- 2) Keputusan pemberian kredit, yaitu : sebagian atau seluruhnya kredit dapat dikabulkan. Terdapat permohonan yang disetujui (baik seluruh permohonan maupun sebagian) dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit.

Dalam keputusan kredit harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sektor usaha yang dibiayai
- b) Jenis kredit (modal kerja/investasi)
- c) Jangka waktu kredit
- d) Suku bunga
- e) Cara pengikatan kredit
- f) Jaminan kredit yang digunakan (bukti-bukti jaminan harus asli, berikut surat kuasa bila jaminan milik orang lain)
- g) Dan lain-lain.

#### d. Pelaksanaan Kredit

Berdasarkan surat keputusan yang telah dibuat, maka sebelum kredit direalisasikan petugas pelaksanaan kredit harus mempersiapkan atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Persetujuan kredit sudah ditandatangani baik oleh pihak debitur beserta avalist (penanggung utang) dan dikantor cabang persetujuan kredit ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang/Seksi Kredit
- 2) Bea materai kredit sudah dibayar oleh pihak debitur
- 3) Premi asuransi barang jaminan sudah dibayar oleh debitur (kuasa jaminan yang diasuransikan)
- 4) Provisi kredit telah dibayar oleh debitur
- 5) Surat kuasa menjual, untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai.
- 6) Surat kuasa jaminan, yaitu dalam hal jaminannya bukan milik peminjam, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai.
- 7) Dalam hal jaminan tertentu (nominalnya besar) bila diperlukan, disyaratkan untuk diasuransikan.
- 8) Dalam hal jaminan bukan milik debitur, pemilik jaminan harus memberi kuasa/notaril menjamin dan ikut menandatangani perjanjian kredit sebagai penanggung utang .
- 9) Membuat tanda penerimaan dan penyerahan jaminan.

- 10) Dibuat kwitansi pembayaran kredit yang harus ditandatangani oleh peminjam.

- 11) Salah satu tembusan perjanjian kredit serta lampiran-lampirannya, hendaknya segera dikirimkan kepada debitur.

- 12) Tembusan hasil analisa kredit yang telah dilealisir disampaikan kepada petugas Supervisi Kredit.

- 13) Debitur hendaknya diberi keterangan tertulis mengenai tujuan penggunaan kreditnya.

#### e. Supervisi Kredit Dan Pembinaan Nasabah

Pengawasan kredit bisa dilaksanakan baik secara pasif maupun secara aktif. Dalam pengawasan kredit ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pengawasan penggunaan kredit :

- 1) Semua penarikan kredit harus dipergunakan sesuai rencana oleh karena itu bank melakukan pengawasan yang ketat dan mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan kredit tersebut, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Kredit yang ditarik tidak dibayarkan langsung kepada debitur tetapi dibayarkan kepada supplier.

- b) Bila cara tersebut pada butir '(a)' tidak mungkin, perlu diminta dokumen/informasi yang meyakinkan bahwa penarikan kredit tersebut benar-benar akan digunakan untuk membeli barang-barang sesuai dengan rencana.

- c) Selanjutnya dilakukan pengecekan setempat oleh petugas bank untuk mengetahui kebenaran dari pada pengeluaran uang untuk investasi tersebut.

- d) Untuk jumlah kredit yang cukup besar (kredit di atas Rp. 10.000.000,-), nasabah perlu, menyampaikan laporan-laporan berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatan dan keadaan perusahaannya. Dari laporan ini bank dapat terus-menerus mengikuti dan meneliti kegiatan perusahaan, apakah segala sesuatunya berjalan menurut rencana atau perhitungan analisa kredit.

- e) Dalam tahapan pertama pembuatan laporan ini dibimbing oleh pihak bank.

- 2) Pengawasan ketertiban pembayaran angsuran dan atau bunga serta pelunasan kredit.
  - a) Bila cicilan pokok dan atau bunga sudah jatuh tempo tidak dibayar pada waktunya, pada satu bulan kemudian bank perlu memberikan surat peringatan kepada debitur, bila belum juga dibayar setelah 2 bulan, bank memberikan surat peringatan ke 2 dan setelah 3 bulan, surat peringatan ke 3.
  - b) Pengawasan untuk debitur kredit modal kerja dilakukan menurut sifat/bentuk pinjaman, yaitu sebagai berikut :
    - (1) Apabila kredit modal kerja diberikan secara uang konten dan pembayaran kembali pada Bank dilakukan secara diangsur/dicicil maka perlu diawasi apakah pembayaran pokok dan bunganya dilaksanakan tepat pada waktunya.
    - (2) Apabila kredit modal kerja diberikan secara sekaligus dan pembayaran kembalinya pun dilakukan secara sekaligus, maka perlu diawasi apakah pembayaran bunganya dilakukan tepat pada waktunya. Bila tidak tertib atau menunggak maka bank memberikan surat peringatan.
    - (3) Apabila kredit, Modal kerja di berikan dalam bentuk R/C maka perlu diawasi apakah pembayaran bunganya dilaksanakan dengan tertib atau tidak. Jika tidak tertib perlu diketahui apakah sebabnya, hal ini penting diperhatikan karena jangan sampai nanti pada saat kredit jatuh tempo debitur tidak mempunyai cukup uang melunasinya.
    - (4) Kredit yang sudah jatuh tempo, hendaknya sebelum tanggal jatuh tempo kredit bank memberitahukan dengan tertulis kepada debitur supaya melunasi kreditnya tepat pada waktunya, jika pada waktu jatuh tempo kredit belum dilunasi, maka dikirim surat peringatan ke 2 dan seterusnya surat peringatan ke 3,

apabila belum di bayar juga setelah peringatan ke 2.

- (5) Kunjungan/Pemeriksaan ke perusahaan debitur. Dengan melakukan pengawasan kredit/ jalannya perusahaan seperti disebutkan di atas, diharapkan kredit akan berjalan lancar.

Bila ada kredit yang tidak lancar atau debitur sudah menunggak dan walupun sudah diberi peringatan tetapi tunggakan belum juga dibayar, maka petugas bank perlu melakukan pemeriksaan ke perusahaan debitur untuk mengetahui kesulitan apa sebenarnya yang dialami hingga debitur menunggak dan tidak melunasinya.

#### f. Syarat Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip perkreditan yang secara sehat telah kenal dan masih digunakan sampai saat ini yaitu prinsip 5 C, yang terdiri dari :

- 1) *Character* (watak) yaitu adanya keyakinan dari pihak bank (kreditur) bahwa si peminjam (debitur) mempunyai moral, watak atau sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan usahanya.
- 2) *Capacity* (kemampuan) yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit bank.
- 3) *Capital* (modal) yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh debitur.
- 4) *Collateral* (agunan/jaminan) yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur atas jaminan dari kredit yang diterimanya.
- 5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi) yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu kurun waktu tertentu yang memungkinkannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha yang dibiayai kredit.



Dari prinsip-prinsip tersebut di atas dapat menarik manfaat penilaiannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Penilaian *Character* pada dasarnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitur.
- 2) Penilaian *Capacity* yaitu untuk menilai sampai dimana kewajibannya tepat pada waktu yang di tentukan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 3) Penilaian *Capital* adalah untuk menilai sampai sejauh mana calon debitur mampu menyediakan dana sendiri (self financing) dalam suatu kegiatan usahanya. Sebaiknya besarnya self financing ini lebih besar dari kredit yang diminta, karena kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar.
- 4) Manfaat penilaian *Collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Juga dapat sebagai alat pengamanan dalam menghadapi situasi ketidak pastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi.
- 5) Maksud penilaian terhadap *Condition of Economic* adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian secara umum, baik yang membawa dampak positif terhadap proyek yang mendapatkan bantuan kredit dari bank tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya  
Pada PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang telah mencerminkan pengendalian manajemen kredit yang cukup memadai dilihat dari personel yang kompeten dan dapat dipercaya. Hal ini dapat kita lihat dari perekrutan karyawan PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang yang disesuaikan dengan

tingkat pendidikan sesuai dengan jenis pekerjaan. Selain itu untuk menciptakan karyawan yang kompeten setiap enam bulan sekali dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan dan setiap satu tahun sekali dilakukan evaluasi kerja. Adanya program tersebut diharapkan petugas yang menangani kredit mampu mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang mengenai kredit. Sehingga pada saat analisis kredit, proses pencairan kredit, serta monitoring dapat ditangani oleh personel yang kompeten.

2. Prosedur Otorisasi yang tepat  
Pada PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang telah menerapkan pengendalian manajemen kredit yang memadai dilihat dari prosedur otorisasi yang tepat. Hal ini dapat dilihat bahwa proses kredit dapat dilakukan jika semua syarat-syarat kredit dari pemohon telah lengkap sesuai dengan prosedur kredit yang dituangkan dalam Form Persyaratan Kredit. Dalam analisis kredit juga prosedur otorisasi sudah berjalan dengan baik yaitu dengan dilakukannya otorisasi oleh bagian *account officer* pada saat analisis kredit dan kemudian hasil analisis kredit tersebut dikaji ulang oleh komite kredit. Pada saat proses penarikan kredit juga telah melalui proses otorisasi yang tepat. Pada saat monitoring kredit bagian yang berwenang adalah *account officer* dan administrasi kredit. Untuk pemantauan kredit yang dilakukan *account officer* adalah pemantauan langsung ke tempat usaha debitur atau rumah debitur sedangkan administrasi kredit adalah dengan cara membuat laporan tentang debitur dalam pembayaran angsuran tiap bulannya dari kartu angsuran. Hal ini telah mencerminkan bahwa pengendalian manajemen kredit telah berjalan dengan baik, karena telah dilaksanakan oleh petugas bank dengan baik dan penuh tanggungjawab.

3. Kontrol aktiva dengan catatan  
Pengendalian manajemen kredit telah berjalan dengan baik jika dilihat dari kontrol aktiva dengan catatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya *on the spot* dengan tujuan untuk mencocokkan antara berkas debitur dan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya dilapangan apakah sesuai atau tidak.

Namun masih terdapat juga beberapa kekurangan dalam pengendalian manajemen kreditnya, yaitu :

1. Adanya pemisahan tugas

Pada PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang belum mencerminkan pengendalian manajemen kredit yang memadai dilihat dari masih adanya perangkapan tugas. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang melakukan analisa permohonan kredit dengan petugas yang memeriksa agunan. Pada PD BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang yang melakukan analisis permohonan kredit dan pemeriksaan agunan adalah account officer.

2. Dokumen dan catatan yang memadai  
Tidak adanya sebagian formulir atau dokumen yang mencantumkan nomer formulir. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya suatu transaksi yang belum tercatat atau tercatat lebih dari satu kali.
3. Belum adanya ketelitian dalam menganalisis penerimaan calon nasabah yang mencakup faktor *character, capital, capacity, condition of economy, collateral*.
4. Pemeriksaan pekerjaan secara independen  
Kelemahan dari pengendalian kredit disini adalah tidak adanya pemeriksaan mendadak atau (*surprise audit*). Dengan adanya pemeriksaan mendadak, diharapkan karyawan pada tiap bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya dan nantinya apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, karyawan tersebut sudah siap.

#### Saran

1. Sebaiknya tugas dari *Account Officer* adalah melakukan analisis kredit, sedangkan yang melakukan pemeriksaan agunan/penilai jaminan sebaiknya dilakukan oleh petugas internal bank atau *appraisal company*. Hal tersebut berdampak pada saat penilaian jaminan dan analisis kredit dilakukan oleh petugas yang berbeda, sehingga persepsi antar petugas juga sangat berpengaruh pada saat penilaian. Adanya pemisahan tugas ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai.
2. Monitoring kredit pada PD BPR Bank Jombang juga perlu ditingkatkan misalnya melakukan pemeriksaan atau kunjungan langsung ke usaha debitur secara rutin atau teratur tujuannya untuk memperbaharui data-data menyangkut tunggakan kredit, dengan demikian kondisi perkreditan akan terus dimonitor perkembangannya dan akan membantu bank dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam

penyelesaian tunggakan maupun jika terjadi kredit macet.

3. Sebaiknya PD BPR Bank Jombang lebih meningkatkan ketelitian dalam menganalisis kredit agar tidak terjadi kesalahan yang sama sehingga dapat meminimalisir terjadinya tunggakan kredit dari tahun ke tahun, agar kredit yang diberikan dapat benar-benar akan kembali dan dibayar lunas sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan debitur sehingga bank tidak mengalami kerugian.
4. Sebaiknya PD BPR Bank Jombang mempertegas lagi Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang telah ditetapkan, dari Prosedur Permohonan Kredit sampai dengan Prosedur Penyelamatan kredit bermasalah. Tindakan ini merupakan salah satu upaya Bank untuk mengurangi resiko kredit bermasalah.
5. Pada prosedur kredit, kredit modal kerja PD BPR Bank Jombang, diharapkan ada peneliti berikut membahas Kredit Modal Kerja sampai dengan pelunasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Hartadi, Bambang, 2005. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungan dengan Manajemen Audit*. Edisi Baru, BPFE UGM : Yogyakarta.
- Malayu, Hasibuan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia
- Mulyadi, 2006. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3, BP STIE YKPN : Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdasyah, 2001. *Dasar – Dasar dan Tehnik Manajemen Kredit*. Edisi Pertama, Cetakan Keenam. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar – dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.